



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
GUNADHANA MITRASEMBADA

Bandung , 05 Mei 2025

No : 04/BPR.GM/V/2025
Lamp : 1 (satu) File
Perihal : **Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR Gunadhana Mitrasembada Tahun 2024**

Kepada Yth :
Perbarindo Pusat dan Majalah Media BPR
Di Tempat

Dengan Hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah pasal 102 ayat 1 , bersama ini kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Gunadhana Mitrasembada tahun 2024.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA



Endah Sri Lestari
Direktur Utama



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
GUNADHANA MITRASEMBADA

Bandung, 30 April 2025

No : 060/BPR.GM/IV/2025
Lamp : -
Perihal : **Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata kelola**

Kepada Yth :
Kantor Regional Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat
Jl. Ir H. Juanda No.152
Bandung 40132

Dengan Hormat ,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024.

Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada



Endah Sri Lestari
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Gunadhana Mitrasembada

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933780-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-602051-02052025143252

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

martha@bprgm.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

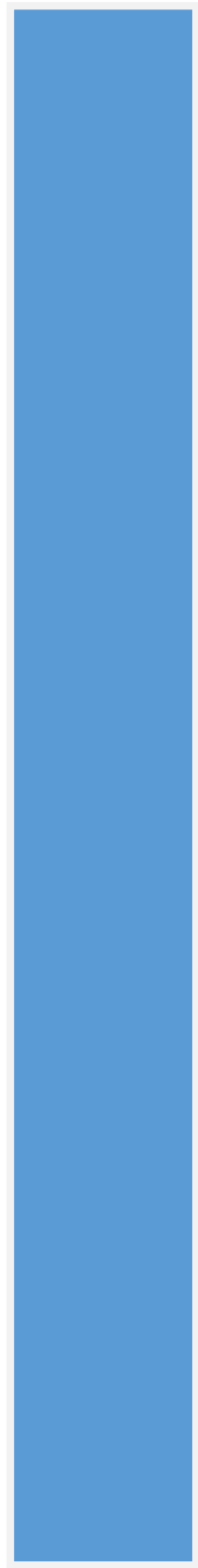
2025-05-02 14:32:52



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR 2024

PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA



A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jl. Naripan No. 70 Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung Bandung
Nomor Telepon	022-4222464
Penjelasan Umum	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Penerapan tata kelola pada BPR sangat penting dengan bervariasinya serta peningkatan jumlah dan kompleksitas usaha yang semakin maju dimana dalam menjalankan BPR juga harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan tata kelola yang baik pada BPR agar dapat menjalankan fungsinya untuk mendukung industri sektor keuangan menjalankan praktik usaha yang sehat. Salah satu bentuk BPR mengikuti perkembangan dinamika industri adalah mengimplementasikan pengelolaan BPR sejalan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkini, serta sesuai dengan kebutuhan industri BPR. Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR dilandaskan pada prinsip dasar yaitu : a. Keterbukaan (transparency) b. Akuntabilitas (accountability) c. Tanggung jawab (responsibility) d. Independensi (independency) e. Kewajaran (fairness) . PT. BPR Gunadhana Mitrasembada dalam melaksanakan penerapan tatakelola terus berupaya meningkatkan implementasi prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kebijakan terkini sehingga memiliki daya saing yang kuat /kompetitif , dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan tercapai sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2024, PT. BPR Gunadhana Mitrasembada memperoleh nilai komposit 2, dengan predikat komposit 2 yaitu : manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik .Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tatakelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : 32730465126700006
	Nama : Endah Sri Lestari
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a.Menetapkan langkah –langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; b.Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; c.Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK; d.Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari pertruran OJK dan perundang-undangan lain.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah melakukan antara lain

- 1). Rapat gabungan Direksi dan manajemen sebanyak 6 kali.
- 2). Komisaris memberikan saran terhadap direksi terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah, terkait dengan pemenuhan komitmen pemeriksaan umum OJK .
- 3) Bank dapat terus meningkatkan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat ,kompetitif.
- 4). Dewan komisaris memberi masukan untuk peningkatan penyaluran kredit, penurunan NPL dan efisiensi biaya

Penjelasan Lebih lanjut :

- 1) Dewan komisaris dan Direksi rutin mengadakan rapat gabungan membahas kondisi usaha terkini dan laporan kinerja perbulan, didalam rapat juga membahas mengenai pencapaian realisasi target bulanan terhadap target RBB, kendala yang dihadapi dilapangan , tantangan pencapaian target , dan rencana yang akan diambil oleh pihak direksi dan Management dlm hal pencapaian target sesuai dengan target yang sudah ditetapkan didalam RBB.
- 2) Direksi telah melakukan upaya penyelesaiann kredit bermasalah dengan cara penagihan rutin, pemberian peringatan sampai dengan somasi dan panggilan secara litigasi dan lelang agunan, sebagian masih dalam proses dan ada pula pelunasan.
- 3) Sistem tata kelola BPR telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Direksi telah melakukan perekrutan tenaga marketing untuk peningkatan kredit sehingga pada akhir bulan Desember 2024 sebesar RP.53,852,647 dibanding pada saat penurunan bulan Mei 2024.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : 3273136303750004 Nama : Cecilia Hansel Jabatan : Komisaris Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris : Wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor esktern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. Wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris Wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kecuali: Penyediaan dana kepada pihak terkait, melakukan rewiuw atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan BPR kepada OJK selambat lambatnya 10 hari sejak ditemukannya pelanggaran atau keadaan tersebut diatas, Wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, yang paling sedikit terdiri dari Etika kerja, Waktu Kerja, dan Peraturan Rapat. Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Menyelenggarakan Rapat Dekom paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan mengenai rencana bisnis BPR, Isu isu strategis, Evaluasi/ penetapan kebijakan strategis dan/atau Evaluasi realisasi rencana Bisnis BPR. Rapat penetapan rencana bisnis BPR wajib diadakan minimal 1 kali setahun dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Rekomendasi kepada Direksi: Dekom berharap agar pihak Direksi dapat terus melakukan perekrutan terhadap tenaga pemasar kredit (marketing kredit) yang handal, menggiatkan pemasaran melalui media sosial, meningkatkan layanan terhadap nasabah dah debitur BPR, dan yang terutama semua rencana dan target Kredit, Deposito, Tabungan dan lainnya yang telah dituangkan kedalam RBB 2025 dapat tercapai dan terwujud meskipun masih ada hambatan hambatan yang harus dilalui dan dilewati seperti peraturan SAK EP yang baru, pembentukkan Biaya CKPN yang begitu besarnya juga situasi kondisi perekonomian yang di tahun 2025.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite :

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada tidak memiliki Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit : -
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko : -
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi : -
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko : -
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya : -
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite : **PT. BPR Gunadhana Mitrasembada tidak memiliki Komite**

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunersi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.	-								
2.									
3.									

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR : **Direksi tidak memiliki saham di BPR lain**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
	-				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR : **Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR lain**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
	-				

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR ; **Pemegang Saham tidak memiliki saham di BPR lain**

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
	-				

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain : **Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
	-				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain : **Dewan Komisaris tidak memiliki saham di perusahaan lain**

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
	-				

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR :**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	32730465126700006	Endah Sri Lestari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR :

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3273136303750004	Cecilia Hansel	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR :

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3273071602710001	TEDDY HARYADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	3273076108780001	EKA SARI DEWI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR :**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	32730465126700006	Endah Sri Lestari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR :

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3273136303750004	Cecilia Hansel	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR :

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3273071602710001	Teddy Haryadi	Tidak ada	Tidak ada	Suami Eka Sari Dewi
2	3273076108780001	Eka Sari Dewi	Tidak ada	Tidak ada	Isteri Teddy Haryadi

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	203.400.000	1	145.800.000
2.	Tunjangan		96.000.000		74.400.000
3.	Tantiem		32.943.000		25.439.568
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi		332.343.000		245.639.568
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan				
2.	Transportasi			1	11.400.000
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya				
	Total Fasilitas Lainnya				
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		332.343.000		257.039.568

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	13,65
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	100,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	100,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	137,03
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	111,72

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16/01/2024	2	Review Hasil Kinerja Direksi sampai dengan Desember 2023 dan RBB 2024, Progress NPL,Evaluasi Laporan Keuangan Desember 23
2.	15/04/2024	2	Review Hasil Kinerja Direksi sampai dengan Maret 2024 dan RBB 2024, Progress NPL,Evaluasi Laporan Keuangan Maret 24
3.	15/07/2024	2	Review Hasil Kinerja Direksi sampai dengan Juni 2024 dan RBB 2024, Progress NPL,Evaluasi Laporan Keuangan Juni 24
4.	15/10/2024	2	Review Hasil Kinerja Direksi sampai dengan September 2024 dan RBB 2024, Progress NPL,Evaluasi Laporan Keuangan September 24
5.	11/12/2024	2	Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank tahun 2025

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	3273136303750004	Cecilia Hansel	5	-	100

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD) : Tidak ada penyimpangan internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam Proses Penyelesaian	6	-
Total	7	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	Teddy Haryadi	Pemilik Saham	3273071602710001	Endah Sri Lestari	Direktur Utama	3273046512670006	Sewa gedung PT.BPR Gunadhana Mitrasembada Jl.Naripan NO.70 Bandung	936.000.000	PT. BPR Gunadhana Mitrasembada menyewa gedung kepada Teddy Haryadi sebagai pemilik saham dan juga sebagai pemilik gedung PT. BPR Gunadhana Mitrasembada.

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	06/09/2025	20250906	01 (Kegiatan Sosial)	Sebuah kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Gunadhana Mitrasembada dengan melakukan kegiatan memberi sejumlah nasi box yang diberikan untuk masyarakat yang selesai melakukan ibadah Jumatan	Nasi box diberikan kepada ketua Dewan Keamanan Mesjid atau disingkat DKM	692.307

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tatakelola PT. BPR Gunadhana Mitrasembada selain untuk memenuhi Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan juga digunakan untuk kepentingan stakeholder dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemegang saham serta memastikan bahwa BPR beroperasi secara sehat dan bertanggung jawab (memastikan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif), menjaga integritas dan mencegah praktik – praktik yang merugikan, meningkatkan kinerja keuangan, melindungi konsumen.

Laporan ini pun merupakan bagian dari upaya kami dalam membangun tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Kami menyadari bahwa perbaikan harus terus dilakukan, dan oleh karena itu masukan serta partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan pelaksanaan tata kelola di masa yang akan datang. Dan laporan ini menjadi refleksi atas pelaksanaan tata kelola yang telah berjalan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar praktik tata kelola dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan transparan.

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tatakelola PT. BPR Gunadhana Mitrasembada ini sebagai gambaran yang jelas atas pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Gunadhana Mitrasembada.

Bandung, 30 April 2025

PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA



Endah Sri Lestari
Direktur Utama

Mengetahui,



Cecilia Hansel
Komisaris Utama